

**BENTUK PELAYANAN SOSIAL PEMERINTAH DESA  
DERMAJI KECAMATAN LUMBIR  
KABUPATEN BANYUMAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)**

**Oleh:**

**FADLURRAHMAN AZMI AMIRUDIN  
NIM : 1522104019**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT  
ISLAM  
JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT  
FAKULTAS DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

## **Bentuk Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas**

Fadhlurrahman ‘Azmi Amirudin

NIM: 1522104019

### **ABSTRAK**

Pemerintah Desa merupakan pemegang kebijakan ditingkat Desa, kedudukan dan kewenangan Desa menjadi alasan Pelayanan Sosial Pemerintah Desa. Pelayanan Sosial atau *social service* pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ataupun program tencanakan untuk menjawab suatu masalah sosial di masyarakat, dengan tujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji merupakan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Dermaji.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena penelitian ini bertujuan menggambarkan strategi pelayanan sosial yang dilaksanakan Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa dan lembaga yang terlibat dalam proses pelayanan sosial Desa Dermaji. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas melaksanakan Pelayanan Sosial di bidang pelayanan perumahan, meliputi; pengadaan air bersih dan renovasi rumah tidak layak huni milik warga. Kemudian bidang pelayanan kesehatan, meliputi; pendidikan anak usia dini, Perpustakaan Desa “jagad aksara” dan musium Desa “Naladipa”. Dan di bidang pelayanan kesehatan, meliputi; cek kesehatan, pengobatan, sosialisasi melalui PKD (Poliklinik Kesehatan Desa) dan posyandu. Perencanaan yang matang, melibatkan masyarakat dan kerjasama dari berbagai pihak, pelayanan sosial tepat sasaran terealisasikan.

**Kata kunci:** Pelayanan Sosial dan Pemerintah Desa

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL-----	i
PERNYATAAN KEASLIAN-----	ii
PENGESAHAN-----	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING-----	iv
MOTTO -----	v
PERSEMBAHAN -----	vi
ABSTRAK-----	vii
KATA PENGANTAR -----	viii
DAFTAR ISI -----	x
DAFTAR LAMPIRAN-----	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang-----	1
B. Definisi Operasional-----	8
C. Rumusan Masalah-----	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian -----	10
E. Kajian Pustaka-----	12
F. Sistematika Penulisan -----	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pelayanan Sosial -----	16
1. Pengertian Pelayanan Sosial -----	16
2. Strategi Pelayanan Sosial-----	18
3. Bidang Pelayanan Sosial-----	20

4. Fungsi dan Tujuan Pelayanan Sosial -----	26
B. Pemerintah Desa -----	28
1. Pengertian Pemerintah Desa -----	28
2. Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Desa-----	29
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa -----	31

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian -----	33
B. Tempat Dan Waktu Penelitian -----	34
C. Subyek dan Obyek Penelitian -----	34
D. Sumber Data -----	35
E. Teknik Pengumpulan Data-----	36
F. Analisis Data-----	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Profil Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas -----	40
1. Sejarah Desa Dermaji -----	40
2. Letak Wilayah Desa Dermaji-----	41
3. Kependudukan Desa Dermaji -----	41
4. Struktur Pemerintahan Desa Dermaji -----	43
5. Lembaga- lembaga di Desa Dermaji-----	43
6. Prestasi Desa Dermaji-----	43
B. Bentuk Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji-----	45
1. Pelaksanaan Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji	46

2. Bentuk Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji -----	49
C. Analisis Penyelenggaraan Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas -----	57
1. Karakteristik Pelayanan Sosial Pemerintah Desa-----	57
2. Kebijakan Pemerintah Desa dan Pelayanan Sosial-----	58
3. Strategi Pelayanan Sosial Pemerintah Desa -----	60
4. Fungsi Pelayanan Sosial Bagi Masyarakat-----	63

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan-----	66
B. Saran-----	67

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN- LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**IAIN PURWOKERTO**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Satu dua abad yang lalu, orang menyebut satu peristiwa sebagai *penyakit sosial* murni dengan ukuran moralistik. Maka kemiskinan, kejahatan, pelacuran, alkoholisme, kecanduan, perjudian, dan tingkah laku yang berkaitan dengan semua peristiwa tadi dinyatakan sebagai gejala penyakit sosial yang harus diberantas dari muka bumi. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, para sosiolog mendefinisikan patologi sosial sebagai semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal.<sup>1</sup> Dalam hal ini peneliti mengaitkannya dengan penyandang kesejahteraan sosial yang merupakan subjek dari patologi sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara

---

<sup>1</sup> Kartini, kartono, *Patologi Sosial*, (pt raja grafindo persada, Jakarta : 2003) Hlm. 1

mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.<sup>2</sup> Perlunya tindakan dari diri seseorang baik kelompok maupun personal itu sendiri, seperti pemerintahan, lembaga ataupun seorang pekerja sosial.

Profesi pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang diakui secara internasional dan mempunyai jaringan organisasi praktik dan pendidikan internasional. Di Indonesia, profesi ini sering dibingungkan dengan volunterisme, par-profesional, dan pegawai negeri. Profesi pekerjaan sosial adalah yang pertama dalam pelayanan manusia yang memberikan fokus pada manusia-dalam-lingkungan sebagai suatu paradigma dalam melakukan asesmen dan perubahan.<sup>3</sup>

Dalam tugasnya pekerja sosial mampu mengembangkan dan mengimplementasikan rencana penanganan pada kelompok dan ataupun individu yang mengalami gangguan. Juliet Cassuto Rothman, kontrak adalah kesepakatan diantara dua pihak yang mendefinisikan dan menggambarkan hakikat relasi diantara mereka, termasuk tanggungjawab masing masing dan hukuman yang mungkin diperoleh apabila salah satu pihak gagal mempertahankan isi kesepakatan.<sup>4</sup>

Pembuatan kontrak dengan klien mendukung nilai dan misi profesi. melalui kontrak, pekerjaan sosial dan klien membuat suatu

---

<sup>2</sup> Tursina, Intan, Musfiroh, Implementasi Program Balai Pelayanan Sosial Pada Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Panti Woro Wiloso Salatiga, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015). Hlm. 25, Diambil dari: <http://lib.unnes.ac.id/20229/1/1201411074-s.pdf> diakses pada tanggal : 26 November 2018, jam : 15 .00 WIB

<sup>3</sup> Albert,Robert,Gilbert, Greene, *Pekerjaan sosial-Social Workers' Desk Reference*, (PT BPK Gunung Mulia, Jakarta :2009). Hlm. xiii

<sup>4</sup> Albert,Robert,Gilbert, Greene, *Pekerjaan sosial*-.....Hlm. 3

komitmen terhadap satu sama lain, dan terhadap tujuan pekerjaan mereka. Tiga jenis kontrak yang sangat berbedayang digunakan dalam setting pelayanan sosial pada umumnya. Kontrak pelayanan atau kesepakatan pelayanan pada umumnya mencakup (1) misi badan sosial, (2) deskripsi program dan pelayanan badan sosial, (3) kerangka waktu bagi penyelenggaraan pelayanan, (4) biaya pelayanan atau ketentuan bagi pengganti biaya pelayanan, (5) kebijakan tentang kerahasiaan, (6) hak untuk mengakses dalam file, (7) memberikan/ membocorkan informasi untuk direkam kedalam video, atau rekaman, (8) memberikan/membocorkan formulir informasi.<sup>5</sup>

Permasalahan sosial seperti diatas juga dapat ditangani melalui suatu pembangunan kesejahteraan sosial. Agar berhasilnya pembangunan tersebut diperlukan suatu perencanaan yang tepat. Sebuah perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang tepat memerlukan data-data yang cepat, tepat dan dapat dipercaya. Disadari pula bahwa pembangunan kesejahteraan sosial memerlukan dukungan dari masyarakat. Usaha dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Masyarakat berperan sebagai pelaksana utama, sedangkan pemerintah adalah menetapkan regulasi dan memberikan fasilitas.<sup>6</sup>

Tugas- tugas pekerjaan sosial bukan hanya dilakukan oleh mereka yang berprofesi sebagai pekerja sosial saja, masyarakat juga memiliki

---

<sup>5</sup> Albert,Robert,Gilbert, Greene, *Pekerjaan sosial*.....Hlm. 4

<sup>6</sup> Tursina, Intan, Musfiroh, *Implementasi Program Balai Pelayanan Sosial Pada Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial* ..... Hlm. 3

peranan penting dalam melakukan tugas tersebut dengan tujuan menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh. Indonesia memiliki tatanan pemerintahan dari tertinggi sampai dengan terendah. Sesuai dengan bunyi UUD pasal 18 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap- tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dalam undang- undang.<sup>7</sup>

Pemerintahan Desa sebagai unit dari lembaga pemerintahan yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Penerapan UU Nomer 32 Tahun 2004, kemudian diterbitkan lagi tentang Undang- Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan Desa dengan pemerintah supra Desa juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di tingkat Desa.<sup>8</sup>

Uraian diatas menunjukkan bahwa, Pemerintahan Desa merupakan subjek penting terkait masalah sosial yang dihadapi masyarakat Desa sendiri, dengan kata lain Pemerintah Desa berperan penting untuk melakukan perubahan bagi Desa melalui pelayanan sosial. Pemerintah Desa pada hakikatnya merupakan pelayan bagi masyarakat Desa sendiri, oleh karenanya upaya- upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam

---

<sup>7</sup> Undang- Undang Dasar 1945, Pasal 18, ayat (1)

<sup>8</sup> Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Setara Press, Malang: 2014). Hlm. 16

mewujudkan Desa sejahtera perlu adanya dukungan dan kerjasama dari masyarakat Desa.

Pelayanan sosial diberikan sebagai salah satu bentuk kebijakan sosial yang ditunjukkan untuk menyebarkan kesejahteraan. Namun pelayanan sosial disini bukan satu- satunya alat yang digunakan untuk mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial. Pelayanan sosial ini diberikan sebagai strategi untuk pembenaran dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang ada. Dalam hal ini paradigma kesejahteraan sosial yang mengacu pada perumusan kebijakan berdasarkan atas kenyamanan masyarakat, sehingga menciptakan kesejahteraan.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan pelayanan sosial, desa dalam hal ini memiliki peranan penting, pemerintah desa dan masyarakat desa memiliki kewajiban dalam menjalankan program kesejahteraan sosial, melalui proses pelayanan sosial, seperti yang sudah diselenggarakan di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas merupakan Desa yang terdiri dari kawasan perbukitan, lembah dan dataran rendah yang diapit tiga baris pegunungan dengan *landscape* hutan pinus di bagian utara dan timur desa, dengan luas 1.302 Hektar, 2 dusun, 7 RW dan 41 RT.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ari, Sugeng, Martopo, Efektivitas Pelayanan Sosial Bagi Klien Alumni Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Tahun 2012-2014, *Skripsi*, (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015). Hlm. 18. Diambil dari: <http://digilib.uin-suka.ac.id/pdf>. diakses pada tanggal : 26 November 2018, jam : 17 .00 WIB.

<sup>10</sup> Wilayah Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, diambil dari : <https://www.dermaji.desa.id/wilayah>. Diakses Pada Tanggal 26 November 2018 Jam : 20.45WIB

Sejarah desa Dermaji tidak ada sumber primer, baik prasasti ataupun naskah tertulis yang menjelaskan sejarah awal keberadaan Desa Dermaji. Sejarah Desa Dermaji hanya dipahami dari cerita lisan yang disampaikan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Dari cerita-cerita lisan itu diyakini bahwa Desa Dermaji termasuk salah satu desa yang keberadaannya sudah cukup tua. Desa Dermaji diperkirakan sudah ada pada masa-masa berdirinya Kerajaan Galuh, Jawa Barat pada abad ke – 6 Desa Dermaji masuk wilayah Kerajaan Galuh.<sup>11</sup>

Warga Desa Dermaji juga memiliki leluhur yang dikenal dengan nama Mbah Darmokusumo. Mbah Darmokusumo ini seringkali digambarkan sebagai sosok yang memiliki tingkat kejujuran yang tinggi dan totalitas kepasrahan kepada Sang Illahi. Bagi warga Dermaji, sosok Darmokusumo menjadi sosok yang dibanggakan, sosok Darmokusumo seringkali dikait-kaitkan dengan asal-usul nama Dermaji. DERMA berarti memberi, AJI berarti sesuatu yang berharga. Desa Dermaji telah dipimpin oleh 11 Lurah/Kepala Desa.<sup>12</sup>

Desa Dermaji memiliki segudang prestasi seperti; mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari 7 Desa Unggulan Tempo 2016 yang diberikan oleh Tempo Media Group bersama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

---

<sup>11</sup> Sejarah Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Diambil dari <https://www.Dermaji.Desa.Id/Sejarah/> Diakses Pada Tanggal 26 November 2018 Jam : 20.45 WIB

<sup>12</sup> Sejarah Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Diambil dari <https://www.Dermaji.Desa.Id/Sejarah/> Diakses Pada Tanggal 26 November 2018 Jam : 20.45 WIB

Kemudian dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi Desa Dermaji mendapatkan penghargaan DesTIKa desa.id Awards 2016 dalam Festival DesTIKa ke-4 di Kab. Jayapura, Papua. Penghargaan ini mengukuhkan Dermaji sebagai desa yang telah menjadi pelopor dalam publikasi daring memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta domain internet khusus desa, desa.id.

Dibidang kebersihan dan kesehatan Desa Dermaji mendapatkan sertifikat ODF yaitu bentuk penghargaan yang diberikan kepada desa yang telah dinyatakan bebas dari buang air besar sembarangan (BABS). Ada beberapa desa di Kabupaten Banyumas yang menerima Sertifikat ODF pada tahun 2016.

Kemudian untuk Kepala Desa Dermaji yaitu bapak Bayu Setyo Nugroho, bersama beberapa tokoh nasional lainnya, mendapatkan penghargaan sebagai Pemimpin Muda yang Menginspirasi (*Inspiring Young Leader*) dari Portal Berita Beritasatu.com. Penghargaan diberikan oleh Presiden terpilih Joko Widodo di Jakarta.

Dibidang infrastruktur Desa Dermaji juga mendapatkan penghargaan Sikompak Award 2014 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan pada proses perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Dermaji.<sup>13</sup>

Latar belakang tersebut menjadi penting dan menarik untuk di bahas dan diteliti, oleh karenanya peneliti bermaksud untuk melakukan

---

<sup>13</sup> Prestasi Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Diambil dari <https://www.dermaji.desa.id/prestasi/> Diakses Pada Tanggal 26 November 2018 Jam : 20.45 WIB

penelitian tentang **“Bentuk Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas”**.

## **B. DEFINISI OPERASIONAL**

Definisi operasional tentang judul skripsi **“Bentuk Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas”**, peneliti mendefinisikan judul tersebut untuk meminimalisir terjadinya kesalah pahaman dalam pembahasan masalah penelitian dan untuk memfokuskan kajian pembahasan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, maka definisi operasional penelitian ini adalah:

### **1. Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial adalah bagiandari pelayanan publik, Berbagai pengertian mengenai Pelayanan (*service*) banyak dikemukakan oleh para ahli; diantaranya menurut American Marketing Association, seperti dikutip oleh Donald W, menyatakan bahwa; “Pelayanan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serat tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin dan mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik”, sementara menurut *Lovelock Christoper*, bahwa “service adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebar dan dirasakan atau dialami”. Artinya service merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat

dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan.<sup>14</sup>

Pelayanan sosial lebih ditekankan pada kelompok yang kurang beruntung, tertekan, dan rentan. Secara umum pelayanan sosial diartikan sebagai tindakan memproduksi, mengalokasi, dan mendistribusi sumberdaya sosial kepada publik. Sumberdaya sosial mencakup seluruh barang dan jasa sosial yang dibutuhkan oleh baik individu maupun masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan.<sup>15</sup>

## 2. Pemerintah Desa

Undang- Undang Nomer 6 Tahun 2014, pasal 1, ayat (2) tentang Desa menjelaskan bahwa, Pemerintahan Desa adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan penyelenggaranya adalah pemerintah desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut nama lain. Dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut berdasarkan asas; kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman,

---

<sup>14</sup> Lutfi J. Kurniawan, Oman Sukmana, Abdussalam, Masduki. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, (Intrans Publishing , Malang:2015). Hlm. 105-106

<sup>15</sup> Janianton, Damanik, Menuju Pelayanan Sosial yang Berkeadilan, *jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 15, Nomor 1, Juli 2011 (1-14) ISSN 1410-4946 (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. 2011). Hlm. 2. Diambil dari: [https://www.researchgate.net/publication/235351498\\_Menuju\\_Pelayanan\\_Sosial\\_yang\\_Berkeadilan](https://www.researchgate.net/publication/235351498_Menuju_Pelayanan_Sosial_yang_Berkeadilan). Diakses pada Tanggal: 26 November 2018, pukul : 09.18 WIB

dan partisipatif. Adapun penyelenggara pemerintahan desa yaitu terdiri dari; Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).<sup>16</sup>

Pemerintahan Desa, didalam PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup>

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah peneliti sehingga tujuan dan sasaran akhirnya menjadi jelas, terarah, dan mendapatkan hasil yang diharapkan.

Dalam hal ini rumusan masalah yang diangkat adalah apa saja program Pelayanan Sosial yang diselenggarakan Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas?

### **D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*.....Hlm. 51,73,76

<sup>17</sup> Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, (Setara Press ,Malang: 2012). Hlm.62

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program pelayanan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

- 1) Mengetahui bentuk Pelayanan Sosial yang dilaksanakan Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dalam melakukan Pelayanan Sosial bagi Masyarakatnya
- 2) Mengetahui strategi Pelayanan Sosial yang dilaksanakan Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dalam melakukan Pelayanan Sosial bagi Masyarakatnya

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya adalah:

a. Manfaat secara Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan tentang Pengembangan Masyarakat Islam
- 2) Menambah wawasan keilmuan tentang Pemberdayaan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

- 3) Menambah wawasan tentang pekerjaan sosial dalam hal ini di bidang Pelayanan Sosial.
- b. Manfaat secara Praktis
- 1) Sebagai sarana bagi peneliti untuk meningkatkan kemampuan dalam penulisan proposal penelitian.
  - 2) Menjadi bahan pertimbangan dalam upaya mencapai tujuan yang berkenaan dengan pelayanan sosial.
  - 3) Sebagai bentuk partisipasi dalam rangka meningkatkan keajahteraan masyarakat melalui program Pelayanan sosial.

#### **E. KAJIAN PUSTAKA**

Berdasarkan hasil pencarian dan penelusuran yang peneliti lakukan terdapat karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan tema kajian yang akan diteliti. Kajian pustaka ditulis untuk menghindari kesamaan dan untuk menghindari plagiasi dengan penelitian lain yang sejenis diantaranya adalah :

*Pertama*, jurnal dari Janianton Damanik yang berjudul “*Menuju Pelayanan Sosial yang Berkeadilan*”, dari jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 15 Nomor 1 ISSN 1410-4946 Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang dilakukan pada tahun 2011. Jurnal ini membahas tentang gagasan awal model pelayanan sosial yang berkeadilan dengan cara mendekonstruksi praktek-praktek pelayanan sosial seperti ini. Hasil Penelitian pertama adalah Konsep Pelayanan Sosial dan Pelayanan Sosial

Berkeadilan melalui Model Alternatif.<sup>18</sup> Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian dan bentuk penelitian, yaitu penelitian ini melalui jurnal sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah skripsi. Persamaan penelitian pertama dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama dalam penggunaan teori pelayanan sosial.

*Kedua*, skripsi dari Tursina Intan Musfiroh Dengan Judul “*Implementasi Program Balai Pelayanan Sosial Pada Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Panti Woro Wiloso Salatiga*”, dari Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang dilakukan pada tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang perencanaan, pelaksanaan program layanan sosial di Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga. Hasil penelitian yang kedua adalah klasifikasi penerima layanan sosial, seperti jenis- jenis dari PMKS, kemudian jenis pelayanan sosial dan proses pelayanan sosial yang ada di Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga.<sup>19</sup> Sedangkan perbedaan penelitian kedua dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian dan sasaran penelitian. Persamaan penelitian kedua dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama dalam menggunakan teori layanan sosial, yaitu menerapkan program pelayanan sosial.

---

<sup>18</sup> Janianton Damanik, Menuju Pelayanan Sosial yang Berkeadilan .....Hlm.2,9

<sup>19</sup>Tursina Intan Musfiroh, (Implementasi Program Balai Pelayanan Sosial .....Hlm. 27,40

*Ketiga*, skripsi dari Ari Sugeng Martopo dengan judul “*Efektivitas Pelayanan Sosial Bagi Alumni Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Tahun 2012-2014*”, dari jurusan Ilmu Kesejahteraan sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Klijaga Yogyakarta yang dilakukan pada tahun 2015. Penelitian yang ketiga menjelaskan tentang bagaimana efektifitas atau tingkat pelayanan sosial yang diterima oleh alumni panti sosial karya wanita. Hasil penelelitian yang ketiga adalah hasil efektif program pelayanan sosial yang ditunjukkan kepada wanita rawan sosial , namun untuk mencapai tingkat efektivitas bagi alumni lulusan 2012- 2014 di Panti Sosial Karya Wanita Yogyakarta harus disertai dengan adanya bantuan pendukung dalam mengaplikasikan ketrampilan.<sup>20</sup> Sedangkan perbedaan penelitian ketiga dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada objek penelitian dan sasaran penelitian juga pada pendekatannya. Persamaan penelitian ketiga dengan penelitian yang akan di lakukan adalah sama dalam menggunakan teori pelayanan sosial, mulai dari pengertian pelayanan sosial, fungsi dan tujuan pelayanan sosial.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan merupakan suatu susunan atau urutan dari penulisan skripsi untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan, peneliti membagi dalam lima bab.

---

<sup>20</sup> Ari Sugeng Martopo, (Efektivitas Pelayanan Sosial Bagi Klien Alumni Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) .....Hlm. 78

Bab I. Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II. Landasan teori, dalam penelitian ini berisi tentang: konsep pelayanan sosial meliputi: pengertian pelayanan sosial, strategi pelayanan sosial, bidang pelayanan sosial, fungsi dan tujuan pelayanan sosial. Pemerintah Desa: pengertian pemerintah Desa, kedudukan dan kewenangan pemerintah Desa dan penyelenggaraan pemerintah Desa.

Bab III. Metode penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu Penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV. Hasil penelitian, berupa 1) gambaran umum lokasi penelitian berupa profil Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, 2) penyajian data, 3) analisis data, dan Pembahasan tentang proses dan hasil pelayanan sosial yang di selenggarakan pemerintah Desa Dermaji.

Bab V. Kesimpulan, berupa kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumass, maka peneliti memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut; strategi usaha pelayanan sosial oleh pemerintah Desa, bahwasannya memegang sebuah kunci yang sesuai akan membukakan pintu yang sesuai juga, antara lain; partisipasi dari berbagai elemen masyarakat menjadi kunci awal dalam keberhasilan sebuah usaha pelayanan tersebut, transparansi pemerintah Desa menjadi kunci kedua, kemudian akuntabilitas juga menjadi kunci ketiga. Dari ketiga kunci tersebut harus selalu dipegang erat- erat.

Bentuk- bentuk pelayanan yang di laksanakan Pemerintah Desa Dermaji, meliputi bidang pelayanan perumahan; air bersih dan renovasi rumah tidak layak huni, kesehatan; pengobatan melalui poliklinik dan sosialisasi Gizi anak melalui Posyandu, pendidikan; Perpustakaan Desa, museum Naladipa dan Pendidikan Anak Usia Dini melalui PosPaud dan TK.

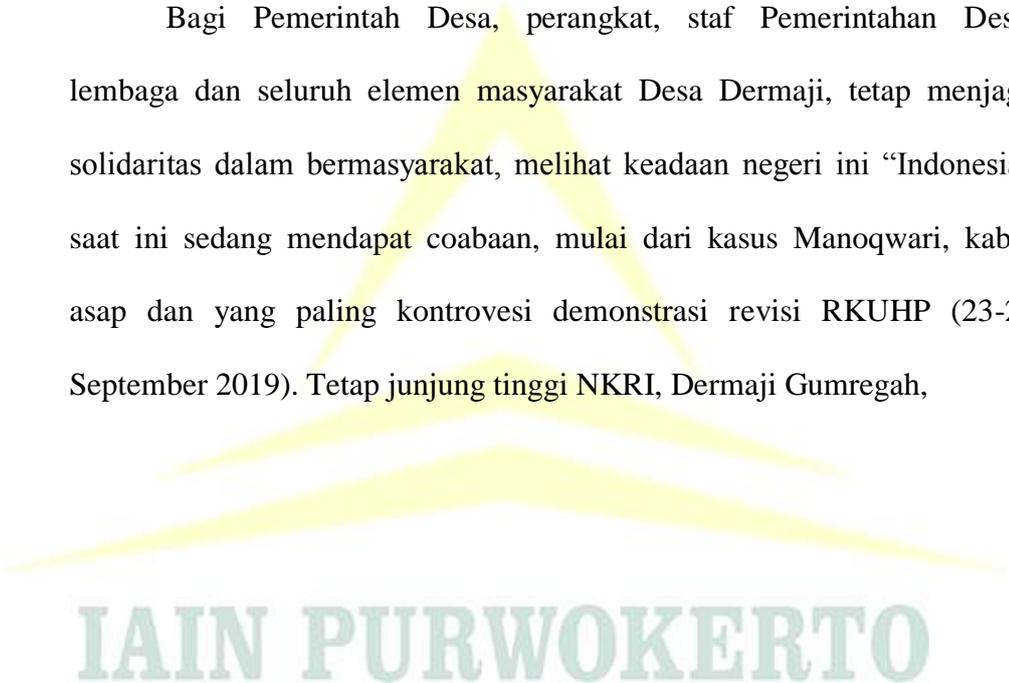
Keberfungsian sosial masyarakat sebagai tujuan dari usaha pelayanan sosial Pemerintah Desa Dermaji, hal ini telah dibuktikan selain dari prestasi juga dari responsif masyarakat terhadap usaha pelayanan

sosial pemerintah Desa itu sendiri dan juga meningkatnya SDM masyarakat melalui bukti pelayanan publik yang inovatif.

## **B. SARAN**

Proses penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menjadi dorongan peneliti memberikan saran, saran yang mungkin akan disampaikan berupa doa dan harapan, terutama bagi pihak- pihak yang tarlibat dengan penelitian ini.

Bagi Pemerintah Desa, perangkat, staf Pemerintahan Desa, lembaga dan seluruh elemen masyarakat Desa Dermaji, tetap menjaga solidaritas dalam bermasyarakat, melihat keadaan negeri ini “Indonesia” saat ini sedang mendapat coabaan, mulai dari kasus Manoqwari, kabut asap dan yang paling kontrovesi demonstrasi revisi RKUHP (23-27 September 2019). Tetap junjung tinggi NKRI, Dermaji Gumregah,



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 2015. *KESEJAHTERAAN SOSIAL (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial Dan Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Adisasmita, Rahardjo, 2013. *Pembangunan Perdesaan (pendekatan partisipatif, tipologi, strategi, konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikuntoro, Suharsimi. 1993. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Damanik, Janianton, 2011. Menuju Pelayanan Sosial yang Berkeadilan, *jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 15, Nomor 1, Juli 2011 (1-14) ISSN 1410-4946, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. Diambil dari: [https://www.researchgate.net/publication/235351498\\_Menuju\\_Pelayanan\\_Sosial\\_yang\\_Berkeadilan](https://www.researchgate.net/publication/235351498_Menuju_Pelayanan_Sosial_yang_Berkeadilan). Diakses pada tanggal: 26 November 2018, Jam : 09.18 WIB.
- Depdikbud, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fahrudin, Adi, 2012. *Pengantar kesejahteraan sosial*, Bandung: PT Rafika Aditama.
- Greene, Albert, Robert, Gilbert, 2009. *Pekerjaan sosial (Social Workers' Desk Reference)*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Husna, Nurul, Ilmu Kesejahteraan sosial dan Pekerjaan Sosial, *Jurnal Al-Bayan* Vol. 20, No. 29, Januari - Juni 2014, diambil dari : <http://jurnal.ar-raniry.ac.id> Diakses pada Tanggal 25 Juni 2019, pukul 09:30 WIB.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero, 2016. *Community Development: Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kartono, Kartini, 2003. *Patologi Sosial*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- K. Rangga, kardiya dan Sumaryo Gitasaputra, 2015. *Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat; Konsep, Teori Dan Aplikasinya Di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Martopo, Ari Sugeng, 2015. (Efektivitas Pelayanan Sosial Bagi Klien Alumni Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Tahun 2012-2014). *Skripsi*. Jogjakarta: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan

Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Diambil dari: <http://digilib.uin-suka.ac.id/16855/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. diakses pada tanggal : 26 November 2018, jam. 17:00 WIB.

Masduki, Lutfi J. Kurniawan, Oman Sukmana, Abdussalam, 2015. *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, Malang: Intrans Publishing.

Musfiroh, Tursina Intan, 2015. (Implementasi Program Balai Pelayanan Sosial Pada Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Panti Woro Wiloso Salatiga). *Skripsi*, Semarang: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Diambil dari: <http://lib.unnes.ac.id/20229/1/1201411074-s.pdf>. diakses pada tanggal : 26 November 2018, jam. 15 :00 WIB.

Pujileksono, Sugeng, 2016. *Perundang- undangan sosial dan Pekerjaan Sosial*, Malang : Setara Press.

Pamungkas, Erna Kurniawati, 2011. Peran Serta Dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Terintegrasi Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Kalasan Tahun. *skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. diambil dari : <http://eprints.uny.ac.id>. diakses pada hari rabu 26 Juni 2019 pukul 09:25 WIB.

Rustanto, Bambang. 2015. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Solekhan, Moch, 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press.

Solekhan, Moch , 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, Malang: Setara Press.

Soehartono, Irawan, 2000. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Suryabrata, Sumadi, 2011. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suharto, G.Didik 2016. *Membangun Kemandirian Desa*, (Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 sertaperspektif UU No. 6/2014) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi, 2007. *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Bandung : Alfabeta.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diambil dari: <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>, diakses pada tanggal 27 november 2018, jam : 20:12 WIB.

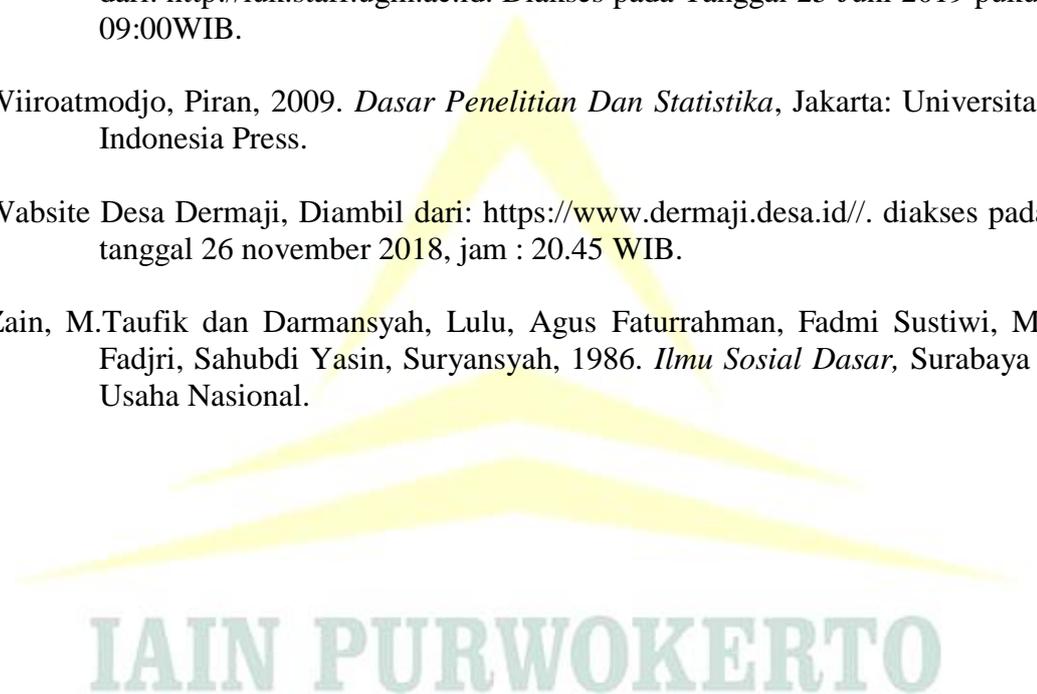
Undang- Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa diambil dari: [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf). pada tanggal 27 november 2018, jam : 21:12 WIB.

Undang- Undang Nomer 11 Tentang Kesejahteraan Sosial Tahun 2009. , diambil dari: <http://luk.staff.ugm.ac.id>. Diakses pada Tanggal 25 Juni 2019 pukul 09:00WIB.

Wiiroatmodjo, Piran, 2009. *Dasar Penelitian Dan Statistika*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Wabsite Desa Dermaji, Diambil dari: <https://www.dermaji.desa.id/>. diakses pada tanggal 26 november 2018, jam : 20.45 WIB.

Zain, M.Taufik dan Darmansyah, Lulu, Agus Faturrahman, Fadmi Sustiwi, M. Fadjri, Sahubdi Yasin, Suryansyah, 1986. *Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya : Usaha Nasional.



IAIN PURWOKERTO